LAPORAN EVALUASI IMPLEMENTASI

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Fokus Analisis: Perbaikan Infrastruktur Jaringan Internet di Kantor Wilayah

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

Disusun untuk Memenuhi Tugas Ujian Praktik Seminar

Pelatihan Tata Kelola dan Manajemen SPBE

Oleh:

Nama Lengkap: Denny Alfian Pribadi

No. Urut: 18

Kelompok: 2

Unit Kerja: Kanwil Kementerian Hukum NTT

B. KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (NTT) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun guna memenuhi tugas ujian praktik seminar Tata Kelola dan Manajemen SPBE. Fokus utama dari evaluasi ini diarahkan pada identifikasi dan solusi perbaikan terhadap kendala infrastruktur jaringan internet (Wi-Fi dan konektivitas) yang saat ini menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan layanan berbasis digital di lingkungan Kantor Wilayah.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan evaluasi dan perbaikan tata kelola teknologi di masa mendatang.

C. DAFTAR ISI

A. Cover 1
B. Kata Pengantar 2
C. Daftar Isi 3
D. BAB I Pendahuluan 4
E. BAB II Pelaksanaan Kegiatan 5
F. BAB III Evaluasi Implementasi SPBE 6
G. BAB IV Kesimpulan 7
H. BAB V Rekomendasi dan Tindak Lanjut 8
I. BAB VI Penutup 9
J. Lampiran (Dokumentasi) 10

D. BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuntut adanya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal, cepat, dan merata. Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (NTT), proses digitalisasi layanan administrasi dan publik sangat bergantung pada koneksi internet. Namun, kondisi eksisting menunjukkan adanya tantangan berat berupa jaringan internet yang lambat, tidak stabil, serta kendala teknis pada perangkat penyebar sinyal (Wi-Fi) yang berdampak langsung pada kelancaran operasional kedinasan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah untuk mengkaji tingkat kesiapan infrastruktur TIK di Kanwil Kemenkumham NTT. Adapun tujuannya meliputi:

1. Mengidentifikasi akar permasalahan terkait kendala jaringan internet yang sering lambat dikantor wilayah.
2. Menganalisis kesenjangan (*gap*) antara kondisi jaringan saat ini dengan standar kebutuhan aplikasi SPBE.
3. Merumuskan rekomendasi teknis dan strategis guna percepatan perbaikan infrastruktur jaringan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi ini difokuskan pada infrastruktur jaringan internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, meliputi kapasitas *bandwidth* dari penyedia layanan (*ISP*), distribusi jangkauan *Access Point* (Wi-Fi), serta kestabilan akses menuju aplikasi terpusat kementerian.

1.4 Dasar Hukum

Pelaksanaan evaluasi ini didasarkan pada regulasi berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Peraturan Menteri Hukum Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital.

E. BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan evaluasi implementasi SPBE dengan fokus perbaikan jaringan ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. **Observasi Lapangan:** Meninjau langsung titik-titik pemasangan perangkat jaringan (*router*,*switch*, dan *Access Point*) di setiap ruangan kerja Kanwil Kemenkumham NTT untuk mendeteksi area *blank spot*.
2. **Pengumpulan Data Primer & Sekunder:** Melakukan wawancara dengan pengelola TIK internal serta merekam keluhan pegawai terkait frekuensi putusnya koneksi internet (*downtime*) dan lambatnya waktu muat (*latency*) aplikasi SPBE.
3. **Analisis Kapasitas:** Membandingkan spesifikasi langganan *bandwidth* eksisting dengan volume akses data pegawai pada jam-jam sibuk.

F. BAB III EVALUASI IMPLEMENTASI SPBE

A. Kondisi Saat Ini Eksisting

Berdasarkan pemantauan di lapangan, jaringan internet (Wi-Fi) di Kanwil Kemenkumham NTT sering mengalami kelambatan yang signifikan terutama pada jam-jam kerja padat. Kapasitas *bandwidth* yang tersedia saat ini tidak sebanding dengan jumlah perangkat aktif yang terhubung. Selain itu, sebaran sinyal tidak merata dan ditemukan beberapa perangkat *Access Point* generasi lama yang sudah mengalami penurunan performa.

B. Kondisi yang diharapkan

Kantor Wilayah memerlukan infrastruktur jaringan internet yang memiliki ketersediaan tinggi (*high availability*), stabil dengan tingkat *uptime* mencapai 99%, serta pembagian jalur data yang merata ke seluruh bidang/divisi. Hal ini esensial agar akses terhadap aplikasi kepegawaian, keuangan, dan persuratan nasional dapat berjalan tanpa kendala jeda waktu (*timeout*).

C. Gap Analysis (Analisis Kesenjangan)

Terdapat kesenjangan yang cukup tajam antara kebutuhan operasional digital berbasis aplikasi dengan kapasitas jaringan eksisting:

Fokus Area	**Kondisi Saat Ini**	**Kondisi Ideal**	**Deskripsi Kesenjangan (Gap)**
Kapasitas vs Beban Jaringan	Kebutuhan *throughput* data meningkat pesat karena bertambahnya modul SPBE, namun pasokan *bandwidth* stagnan.	Kapasitas *bandwidth* memadai dan proporsional untuk mengakomodasi seluruh beban operasional digital SPBE dengan lancar.	Laju pertumbuhan beban operasional digital melesat jauh meninggalkan kapasitas *bandwidth* fisik yang tersedia.
Manajemen Jaringan	Belum ada QoS. Lalu lintas data non-kedinasan bebas mengakses jaringan dan menguras kuota koneksi utama.	Sistem otomatis memprioritaskan jalur data untuk aplikasi kedinasan demi menjaga stabilitas layanan.	Ketiadaan sistem pengatur lalu lintas data (*traffic shaping*) membuat aplikasi kritis bersaing langsung dengan akses non-esensial.

G. BAB IV KESIMPULAN

Kendala jaringan Wi-Fi yang lambat dan tidak stabil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT merupakan faktor penghambat utama (*bottleneck*) dalam akselerasi transformasi digital. Betapapun canggihnya aplikasi SPBE yang dikembangkan oleh instansi pusat, efektivitasnya tidak akan tercapai apabila fondasi konektivitas di satuan kerja daerah masih bermasalah. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur jaringan harus diprioritaskan.

H. BAB V REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi Perbaikan Jaringan

1. **Peningkatan Bandwidth:** Melakukan pengajuan penambahan kapasitas langganan internet (*upgrade bandwidth*) kepada penyedia layanan (*ISP*) guna mengakomodasi lonjakan trafik pegawai.
2. **Optimalisasi Topologi & Perangkat:** Melakukan peremajaan perangkat keras jaringan (penggantian *Access Point* lama dengan standar Wi-Fi terbaru) serta menata ulang letaknya untuk menghilangkan area *blank spot*.
3. **Penerapan QoS (Quality of Service):** Mengonfigurasi *router* utama untuk memprioritaskan paket data aplikasi kedinasan dan membatasi akses unduhan/hiburan non-esensial selama jam kerja.

B. Rencana Tindak Lanjut

- **Jangka Pendek (Bulan ke-1):** Melakukan audit menyeluruh (*Network Assessment*) terhadap jalur kabel dan konfigurasi *router* serta menerapkan pembatasan bandwidth sementara.
- **Jangka Menengah (Bulan ke-2 s.d. 3):** Eksekusi penambahan kapasitas internet dan pengadaan *Access Point* baru melalui skema pemeliharaan rutin instansi.

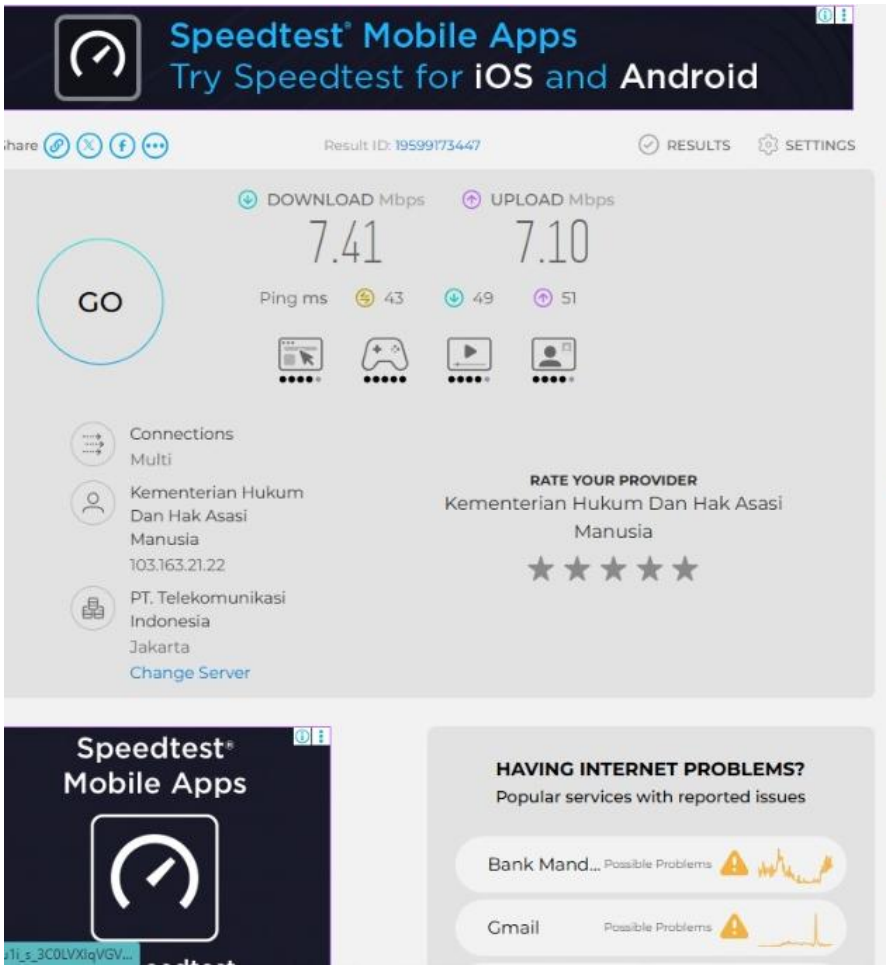
I. BAB VI PENUTUP

Demikian laporan evaluasi ini disusun secara objektif berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Perbaikan infrastruktur jaringan internet di Kanwil Kementerian Hukum NTT diharapkan dapat segera terealisasi demi mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan berbasis elektronik serta mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabel.

J. LAMPIRAN (DOKUMENTASI)

Bagian ini memuat dokumen pendukung pelaksanaan evaluasi jaringan:

1. Tangkapan layar hasil uji kecepatan internet (*Speedtest*) di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT.



2. Dokumentasi visual pengecekan fisik perangkat *Router* dan *Access Point* yang bermasalah.





3. Dokumentasi visual pengecekan fisik perangkat Server



